

ANTISIPASI KEBIJAKAN MENYONGSONG AEC 2015

Dr. Ir. A.H Rahadian, M.Si

ABSTRAK

Dalam menghadapi realisasi Asean Economic Community 2015, negara-negara anggota ASEAN termasuk Indonesia harus melakukan upaya guna mempersiapkan diri. Salah satu perangkat yang perlu dipersiapkan adalah pengaturan pemerintah suatu negara melalui peraturan atau kebijakan publik (*public policy*)

Dalam rangka pengaturan negara, untuk menghadapi AEC 2015 dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang terdiseminasi penuh antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat secara keseluruhan walaupun saat ini masih terdapat ketidak-harmonisan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat sehingga muncul isu adanya ego-sektoral kelembagaan dalam upaya persiapan menuju AEC 2015.

Perlu segera dirumuskan suatu kebijakan untuk melaksanakan tujuh langkah strategis yang perlu diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia, yaitu Sosialisasi Besar-besaran, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Penyediaan Modal, Perbaikan Infrastruktur, Reformasi Kelembagaan & Pemerintah, Reformasi Iklim Investasi.

Kata kunci : Public Policy, Langkah Strategis Pemerintah

PENDAHULUAN

Perkembangan ASEAN memasuki babak baru dengan diadopsinya Visi ASEAN 2020 di Kuala Lumpur tahun 1997 yang mencita-citakan ASEAN sebagai Komunitas negara-negara Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil, sejahtera, saling perduli, diikat bersama dalam kemitraan yang dinamis di tahun 2020. Selanjutnya ASEAN juga mengadopsi Bali Concord II pada KTT ke-9 ASEAN di Bali tahun 2003 yang menyetujui pembentukan Komunitas ASEAN. Pembentukan Komunitas ASEAN ini merupakan bagian dari upaya ASEAN untuk lebih mempererat integrasi ASEAN. Selain itu juga merupakan upaya evolutif ASEAN untuk menyesuaikan cara pandang agar dapat lebih terbuka dalam membahas permasalahan domestik yang berdampak pada kawasan tanpa meninggalkan prinsip-prinsip utama ASEAN, yaitu: saling menghormati (*Mutual Respect*), tidak mencampuri urusan dalam negeri (*Non-Interference*), konsensus, dialog dan konsultasi. Komunitas ASEAN terdiri dari tiga pilar yang termasuk di dalamnya kerja sama di

bidang ekonomi, yaitu: Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Security Community/ASC), Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community/ASCC).

Pencapaian Komunitas ASEAN semakin kuat dengan ditandatanganinya "Cebu Declaration on the Establishment of an ASEAN Community by 2015" oleh para pemimpin ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN di Cebu Filipina, 13 Januari 2007. Dengan ditandatanganinya deklarasi ini, para pemimpin ASEAN menyepakati percepatan pembentukan Komunitas ASEAN/ASEAN Community dari tahun 2020 menjadi 2015.

Lalu komitmen tersebut, khususnya di bidang ekonomi, dilanjutkan dengan penandatanganan ASEAN Charter/Piagam ASEAN beserta cetak biru AEC 2015 pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura, pada 20 November 2007. Penandatanganan Piagam ASEAN beserta cetak birunya AEC adalah merupakan babak baru dalam kerja sama ASEAN di bidang ekonomi di usianya yang keempat puluh tahun.

Seperti yang telah disebutkan di atas, bahwa AEC adalah merupakan salah satu dari tiga pilar utama dalam ASEAN Community 2015, yang ingin membentuk integrasi ekonomi di kawasan ASEAN Tenggara. AEC memiliki lima pilar utama, yaitu aliran bebas barang (*free flow of goods*), aliran bebas jasa (*free flow of service*), aliran bebas investasi (*free flow of investment*), aliran bebas tenaga kerja terampil (*free flow of skilled labour*), dan aliran bebas modal (*free flow of capital*).

Dalam menghadapi realisasi Asean Economic Community 2015, negara-negara anggota ASEAN termasuk Indonesia harus melakukan upaya guna mempersiapkan diri. Salah satu perangkat yang perlu dipersiapkan adalah pengaturan pemerintah suatu negara melalui peraturan atau kebijakan (*policy*). Hal ini penting karena dapat menciptakan alur serta panduan bagi suatu negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan juga dapat mengarahkan masyarakat serta perangkat negara lainnya menuju tahap yang ingin dicapai, sehingga pengaturan melalui kebijakan (*policy*) ini merupakan langkah pertama sebagai upaya mempersiapkan Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya dalam menghadapi Asean Economic Community pada tahun 2015 kelak. Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk

memberikan pandangan bagaimana kesiapan Indonesia dalam hal pengaturan kebijakan (*policy*) sebagai upaya persiapan menyongsong Asean Economic Community 2015.

Peraturan kebijakan (*policy*) dalam kaitannya dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik dibuat untuk menjaga ketaatan-asas tindakan administrasi negara yang dilakukan oleh pemerintah selaku pihak yang berwenang, antara lain asas persamaan perlakuan, asas kepastian hukum, dan asas dapat dipercaya. Dalam praktik, peraturan kebijakan dapat berupa keputusan, instruksi, edaran, petunjuk, pengumuman, dll.

Hingga Tahun 2012, populasi ASEAN mencapai 617,68 juta jiwa dan Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak di kawasan regional Asean pun dapat menjadi kondisi yang membahagiakan sekaligus menjadi suatu bentuk kekhawatiran bagi Indonesia dalam menghadapi pasar tunggal 2015, maka dibutuhkan pengaturan melalui kebijakan yang tepat agar tujuan Asean dan Tujuan Nasional dapat tercapai secara beriringan.

Tidak sedikit pendapat atau kritikan terkait ketidaksiapan Indonesia dalam menghadapi AEC. Kondisi ini tentu bukanlah hal yang baik bagi Indonesia karena hal ini pun dapat mempengaruhi pandangan negara-negara lain terhadap Indonesia. Kekhawatiran serta stigma yang terdapat di masyarakat baik nasional maupun internasional harus disikapi dan ditangani dengan hati-hati oleh pemerintah karena seluruh upaya yang ditempuh maupun yang akan ditempuh harus sesuai tujuan agar menghilangkan atau meminimalisir anggapan pesimis tersebut, karena sedikit kekeliruan dapat menjadi ancaman bagi Indonesia dipenghujung tahun 2015 kelak.

Mengapa kebijakan publik penting? Mari kita membayangkan Indonesia tahun 2015. Pada tahun 2015, ASEAN akan semakin terintegrasi dalam bentuk ASEAN community, sebuah bentuk baru yang mendekati European Community. Pada tahun 2015, bukan saja perdagangan dan investasi di antara Negara ASEAN akan benar benar terbuka, dalam hal tenaga kerja paling rendah pun akan lebih terbuka.

Tantangan terbesar dari Jakarta adalah menjadi salah satu simpul (*hub*) perdagangan di ASEAN. Tantangan ini mengemuka karena hingga hari ini Jakarta dan seluruh kota pelabuhan di Indonesia baru bersifat sebagai *feeder* dari Singapura. Tanpa kesiapan, termasuk dengan

memperbaiki pelabuhan laut, sistem kepabean, bongkar muat, dan pemberantasan “mafia pelabuhan”, Jakarta akan menjadi *feeder* abadi dari Singapura ketika ASEAN Community terbentuk.

KONDISI DAYA SAING INDONESIA

Berdasarkan laporan The Global Competitiveness Index 2013–2014, World Economic Forum 2013 kondisi Indonesia untuk melaksanakan investasi dinilai belum cukup kompetitif sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini

The Global Competitiveness Index 2013–2014

No	Negara	Rank	Score
1	Singapore	2	5.61
2	Malaysia	24	5.03
3	Brunei	26	4.95
4	Thailand	37	4.54
5	Indonesia	38	4.53
6	Laos	48	4.08
7	Phillipines	59	4,29
8	Vietnam	70	4.18
9	Kamboja	88	4.01
10	Timor leste	138	3.25
11	Myanmar	139	3.23

Sumber: world Economic Forum 2013//www. Weforum.org

Dikawasan ASEAN, dari 11 negara posisi Indonesia berada di peringkat ke-5 atau 38 peringkat global. Posisi ini menempatkan peringkat Indonesia di bawah Singapura (1), Malaysia

(24), Brunei (26), dan Thailand (27), sehingga untuk hadirnya investasi Indonesia masih kalah bersaing dengan keempat negara tersebut.

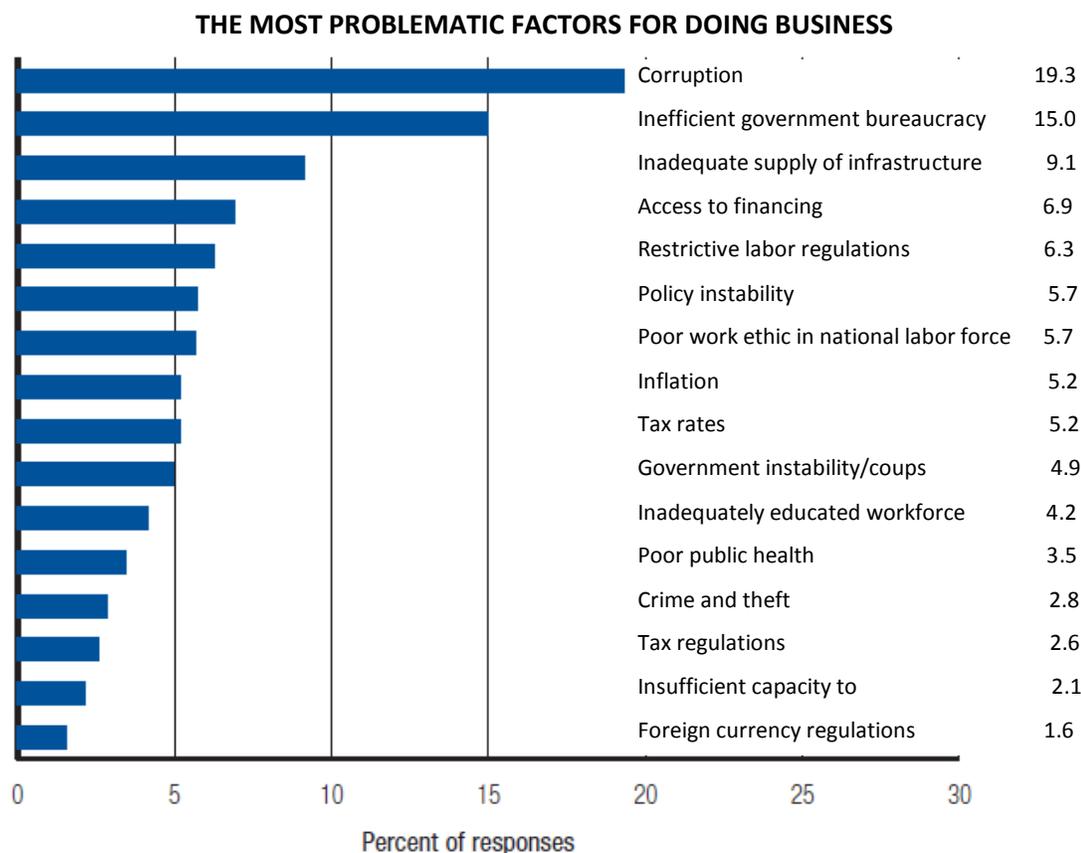
Relatif rendahnya peringkat daya saing Indonesia, penyebab utamanya dari tahun ketahun hampir tidak berubah yaitu korupsi yang tinggi, in efisiensi birokrasi pemerintah, dan pasokan infrastruktur yang tidak memadai.

Posisi Indonesia kini berada dalam kelompok negara berkembang lainnya seperti Brazil, walaupun masih lebih baik dari Filipina, Meksiko, Afrika Selatan dan Rusia.

Sementara The International Institute for Management Development (IMD) Competitive Center menyebutkan bahwa faktor utama penghambat bisnis di Indonesia, adalah:

1. Kualitas dan Kuantitas SDM belum meningkat
2. Belum efisiennya birokrasi dan terlampau banyak paket deregulasi
3. Belum membaiknya infrastruktur
4. Regulasi perpajakan yang memberatkan
5. Pertumbuhan ekonomi meningkat namun 65% disokong oleh konsumsi domestik sisanya ekspor
6. Kebijakan yang tidak solid, otonomi daerah menimbulkan implementasi kebijakan sulit diarahkan/mengalami hambatan.
7. KKN

Selanjutnya berdasarkan laporan The Global Competitiveness Report 2013–2014//World Economic Forum, yang dirilis pada akhir tahun 2013 mengemukakan beberapa faktor yang menjadi penyebab hambatan di Indonesia untuk dapat memulai bisnis (*The Most Problematic Factors for Doing Business*), sebagaimana terlihat pada tabel berikut:



Sumber : The Global Competitiveness Report 2013–2014//World Economic Forum 2013

Dari laporan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia untuk menjadi “pemain” atau bukan penonton harus sudah memulai memperbaiki berbagai hal dalam menyongsong AEC 2015

KEBIJAKAN PUBLIK (PUBLIC POLICY)

Berbagai definisi kebijakan public yang dikemukakan oleh para pakar menurut Nugroho Rian (2012: 119-123) dapat dirumuskan, kebijakan publik (*policy*) adalah *an authoritative decision. Decision made by the one who hold the authority, formal or informal*. Publik adalah sekelompok orang yang terikat dengan suatu isu tertentu. Jadi, “Publik bukanlah umum, rakyat, masyarakat, maupun sekadar *stakeholders*, Publik adalah *a sphere where people become citizen, a space where citizen interact, where state and society exist*” . Jadi *public policy* adalah:

“Any state or Government (as the holder of the authority) decision to manage public life (as a sphere) in order to reach the mission of the nation (remember, nation is consist of two institutions: state and society”

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa kebijakan publik adalah: “Setiap keputusan yang dibuat oleh Negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan”

Dinamika kebijakan publik memberikan arah bagi pemahaman kebijakan Negara maju dan terbelakang. Pemahaman yang dikedepankan adalah bahwa negara maju bukan diukur dari kebijakan publik yang dibuat atau dimilikinya, melainkan dari karakter kebijakannya. Kecenderungan negara maju, kebijakannya mengarah kepada perlindungan dan kesinambungan sumber daya alam, pemberdayaan, mememanajementi, menggerakkan manusia dan merespons masa depan. Sementara negara berkembang cenderung mengembangkan kebijakan yang mengekstraksi kekayaan alam secara besar-besaran, lebih pada kebijakan yang serba melarang daripada memberdayakan, cenderung mengendalikan, menjaga manusia agar tidak beranjak dari tempatnya, dan mengutamakan tertib amasa lalu dan status quo daripada masa depan.

Persiapan Kebijakan Menyongsong AEC 2015

AEC ibarat dua mata pisau bagi Indonesia, bisa menjadi peluang yang membawa manfaat dan berkah (*land of opportunities*) juga bisa menjadi musibah (*loss of opportunities*). Kita akan menjadi produsen yang banyak mengekspor atau justru menjadi sasaran empuk importir. Jawabannya adalah pada kesiapan Indonesia menghadapi AEC. Seberapa siapkah Indonesia menghadapi AEC?

Banyak pihak yang mendesak agar pemerintah segera melakukan persiapan menyambut AEC 2015 yang sekiranya belum terdengar gaungnya. Langkah-langkah

strategis pun sebaiknya diterapkan dengan segera. Satu tahun kedepan bukanlah waktu yang sangat singkat untuk persiapan persaingan ketat ini. Setidaknya perlu segera dirumuskan suatu kebijakan untuk melaksanakan tujuh langkah strategis yang perlu diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia.

1. Sosialisasi Besar-Besaran

Upaya sosialisasi hajat besar AEC 2015, ternyata belum merata. Hanya terbatas kalangan tertentu. Bisa dibbilang, hanya kalangan menengah ke atas. Sedangkan, masyarakat awam ke bawah tidak begitu mengenalnya. Jangankan bersiap, mengenal pun tidak.

Sebagai perbandingan Atmosfir ASEAN dan AEC di Thailand sangatlah terasa. Pemerintah Thailand terlihat tak menganggap remeh pelaksanaan AEC, banyak sekali spanduk, umbul-umbul dan papan-papan di berbagai fasilitas umum yang menginformasikan pelaksanaan AEC, media cetak, dan televisi juga aktif mengabarkan berita ini melalui countdown yang dihitung mundur setiap harinya

Di sinilah peran besar Komunitas ASEAN dibutuhkan, yaitu sosialisasi hal-hal terkait upaya pemerintah menyambut AEC. Agar informasi bisa menjangkau masyarakat luas.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM merupakan hal yang paling krusial dalam menghadapi AEC. SDM yang berkualitas akan mampu bersaing dan kuat menghadapi tantangan. Cekatan serta inovatif dalam mengambil ide, langkah, dan tindakan. Peningkatan kualitas SDM misalnya dengan pelatihan bahasa. Bahasa sangat penting dalam peranan persaingan global. Terutama bahasa inggris. Selain itu, pengembangan skill dapat dilakukan dengan pelatihan, workshop, pertemuan rutin antarpelaku ekonomi, juga

pembangunan networking. Semua hal ini dilakukan agar pelaku ekonomi selalu mengikuti perkembangan terbaru perekonomian. Optimisme Indonesia bisa harus dimiliki para SDM yang berkualitas

3. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan sektor ekonomi nasional yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Pemberdayaan ini dapat menciptakan iklim usaha dan mengurangi ekonomi biaya tinggi. Pemberdayaan UMKM sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi. Persaingan dalam hal kualitas maupun kuantitas yang bukan hanya untuk pasar lokal dan nasional, tetapi juga ekspor. Semakin banyak UMKM yang bisa mengekspor, akan semakin besar pula daya saing ekonomi Indonesia. Pelatihan penggunaan website dalam rangka memperluas segmentasi konsumen juga sangat diperlukan di era digital saat ini. Hal ini yang terkadang masih jarang dilakukan oleh UMKM.

4. Penyediaan Modal

Pemodalannya sangat penting untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu usaha. Oleh karenanya, dibutuhkan lembaga pemodalannya yang mudah diakses oleh pelaku usaha dari berbagai skala. Terutama pelaku UMKM yang seringkali kesulitan dalam penambahan modal.

5. Perbaikan Infrastruktur

Infrastruktur berupa sarana dan prasarana seperti logistik, listrik, telekomunikasi, revitalisasi transportasi, jalan raya, rel kereta api, pelabuhan, bandara, dan lain-lain. Kita mengetahui bahwa kesemua faktor ini sangat mempengaruhi proses produksi dan distribusi. Oleh karenanya, perbaikan infrastruktur ini harus disegerakan. Tersendatnya logistik dapat meningkatkan inflasi. Karena daya saing juga sangat ditentukan cepat lambatnya keluar masuk barang.

6. Reformasi Kelembagaan & Pemerintah

Kelembagaan dan pemerintah yang taat hukum & tidak memihak sangat diharapkan. Sikap kelembagaan & pemerintah yang kooperatif terhadap pelaku usaha merupakan salah satu hal yang harus diperbaiki. Tidak mempersulit urusan administrasi dan birokrasi yang berkepanjangan.

Penguatan lembaga hukum harus ditingkatkan, terutama dalam hal independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum. Sehingga tercipta iklim kelembagaan hukum yang profesionalisme dan transparan. Upaya peningkatan kesejahteraan kelembagaan & pemerintah juga terus dilaksanakan guna mencegah tindakan yang mengarah dan berpotensi koruptif atau pungli.

7. Reformasi Iklim Investasi

Indonesia harus melakukan pembenahan iklim investasi melalui perbaikan infrastruktur ekonomi, menciptakan stabilitas makro-ekonomi, serta adanya kepastian hukum dan kebijakan, dan memangkas ekonomi biaya tinggi.

Peran aktif Komunitas Blogger ASEAN dalam rangka mendukung sosialisasi AEC harus dilakukan secara rutin dan berkala hingga tiba saatnya nanti 31 Desember 2015. Tidak berhenti hanya pada satu momen. Komunitas Blogger ASEAN diharapkan terus menyebarkan informasi terkini seluas-luasnya juga mengawasi kinerja pemerintah dalam hal persiapan menyongsong AEC. Menyumbangkan beberapa ide dan masukan untuk pemerintah dan juga pelaku usaha dalam upaya menyongsong AEC 2015. Mungkin, *countdown*, hitungan mundur lahirnya AEC perlu diterapkan. Setidaknya di dalam sidebar website kita masing-masing. Sehingga akan terus mengingatkan kita akan seberapa jauh dan matangkah persiapan kita.

Ketujuh kebijakan tersebut harus segera dilakukan oleh pemerintah, dan sangat sulit dilaksanakan apabila hal ini harus dilakukan oleh dunia bisnis.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Perdagangan RI.2015 ---. Menuju Asean Economic Community.

Rian, Nugroho. 2012. Public Policy. Jakarta:Gramedia.

<http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014>. The Global Competitiveness Report 2013–2014//World Economic Forum 2013

<http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2013-2014>.The International Institute for Management Development (IMD) Competitive Center